

URGENSI JARINGAN DALAM TATA NEGARA ISLAM

Rizal Al Hamid

NASIONALISME DALAM TINJAUAN ISLAM

Ahmad Hanany Naseh

JAMINAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM

Andrie Irawan

PERNIKAHAN SIRRI DI KALANGAN SANTRI
STUDI KASUS PONDOK PESANTREN NIDAUL UMMAH
GILANG HARJO PANDAK BANTUL

Agus Tri Wijaya, F. Setiawan Santoso, Nurjiddin

PENDIDIKAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN
MENUJU KELUARGA SAKINAH

Siti 'Aisyah

SISTEM HISAB MENURUT HISAB SULLAM AN-NAYYIRAIN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH

Muthmainnah

TINJAUAN PUSTAKA
DISKURSUS POLITIK ISLAM

M. Nur Kholis Al Amin, Dhifla Najih

JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN	
U L U M U D D I N	
Volume 4, Nomor 2, Desember 2014	ISSN : 1907-2333

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Agama Islam
Pimpinan Redaksi : Dra. Dhifla Najih, M. S.
Sekretaris : Fattah Setiawan S., M. Ag.
Bendahara : Drs. Moh. Nasrudin, M. Ag.
Mitra Bestari : Dr. Inu Kencana, M.A. (USP Semarang)
Dr. Lukman Fauroni (IAIN Surakarta)
Dr. Muqowim M.Ag. (UIN Sunan Kalijaga)
Dr. Syamsul Hadi M.Ag. (UIN Sunan Kalijaga)
Dra.Hj.Siti 'Aisyah, M.Ag. (UCY)
Dra. Istifianah, M.Ag. (UCY)
- Dewan Redaksi : Drs.Nurdjidin, M.Si.
Drs. A. Hanani Nasheh, M.A.
Drs.Taufik Nugroho, M.Ag.
Mutmainnah, S.H.I., M.S.I.
Cipto Sembodo, S.Ag.,M.A.
Umi Musaropah, S.Hum. M.Ag.
Bustan Basir Maras, S.H.I., M.A.
- Setting & Lay out : Marwan Indra Praja, A. Md.
Alamat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman “Ulumuddin”
Fakultas Agama Islam
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran
Umbulharjo, Yogyakarta
Telp. 0274-372274 (hunting)
Fax. 0274-4340644
e-mail: wsfaiucy@gmail.com

Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Ulumuddin adalah media ilmiah berkala tentang kajian gagasan, teori, maupun terapan yang berkaitan dengan agama Islam, khususnya Pendidikan dan Hukum Islam. Isi naskah kajian yang diterbitkan dalam jurnal ini merupakan tanggung jawab penulis yang bersangkutan.

Penerbit	UCY PRESS Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran. Umbulharjo, Yogyakarta Telp. 0274 - 372274 (hunting), Fax. 0274-4340644
-----------------	--

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh
Bismillahirrahmanirrahim

Ucapan Syukur dan Alhamdulillah atas terbitnya Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Ulumuddin Volume 4 no 2, Desember 2014 bidang hukum Islam dapat diterbitkan. Salawat dan salam teriring bagi Rasulullah saw atas bimbingannya menuju jalan yang dibenarkan selama proses publikasi jurnal ini. Ucapan terima kasih juga tak terlupakan untuk disampaikan kepada para penyumbang naskah yang telah bersedia untuk bersusah payah menulis sesuai dengan ketentuan.

Pada edisi ini, Hukum Islam difokuskan pada kajian implementasi syariah dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Kajian ini dimulai dengan tulisan Rizal Al Hamid yang mengetengahkan kajian teori jaringan dalam membangun solidaritas kenegaraan berdasarkan nas al-Quran dan hadis disertai sejarahnya. Dari teori jaringan bisa diketahui bahwa ikatan dalam jaringan individu atau kelompok sangat berarti. Hal itu tak jauh berbeda dengan kondisi yang ada dalam pergerakan kelompok-kelompok Islam dalam menyuarakan keinginan mereka untuk konsisten terhadap agamanya dalam kehidupan bernegara. Upaya memperkuat jaringan yang bisa dihubungi tak bisa lepas dari pertimbangan-pertimbangan terhadap ikatan-ikatan yang terjadi dalam interaksi. nilai dasar Hukum Islam yang dapat menjadi pokok ikatan-ikatan dalam membangun jaringan antar kelompok Islam. Ikatan itu terasa manfaatnya guna menegakkan operasionalisasi Negara yang sesuai dengan Syariah.

Ahmad Hanany Nasheh mempertegas kebutuhan Negara dalam Islam melalui pembangunan semangat nasionalisme yang dibenarkan dalam Islam. Dalam sejarah Islam secara global maupun bangsa indonesia, hakikat nasionalisme adalah kemauan untuk bersatu sebagai satu bangsa dalam arti politik, dimana kesatuan bangsa dalam arti politik itu menjadi jauh lebih kokoh bila didukung oleh faktor, satu agama, satu bahasa, dan satu ras lebih menonjol. Namun Nasionalisme yang fanatik tanpa toleransi dengan meremehkan nilai-nilai agama tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nasionalisme dalam pandangan Islam adalah dimana cinta dan

loyalitas kepada tanah air tidak boleh melebihi cinta dan loyalitasnya kepada Allah dan RasulNya.

Andrie Irawan kemudian menjelaskan bagaimana Islam telah sesuai HAM modern dengan perlindungannya terhadap perempuan. Ia mengkaji dengan kombinasi kajian normatif dan historis dengan acuan al-Quran dan Sunnah. Dalam kesimpulannya, ia memberikan penegasan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* dengan segala kelengkapan yang mencakup aturan bagi segala aspek kehidupan termasuk jaminan atas Hak Asasi Manusia yang tidak diskriminatif dan berkeadilan.

Agus Tri Wijaya dkk. memang membahas tidak membahas tentang aspek kenegaraan dalam Islam. Singgungan dengan aspek negara ada namun muncul dalam uraian mereka secara tidak langsung. Peran paling pokok untuk mengembangkan kesadaran terhadap pernikahan sirri adalah bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi pandangan santri yang belum menikah terhadap pernikahan sirri dalam penelitiannya.

Dalam sarannya ia menjabarkan tentang sebagian santri telah menyadari bahwa pengetahuan aspek penting dalam menyikapi pernikahan sirri. Perluasan pemahaman perlu ditingkatkan agar keputusan santri bisa diambil dengan pertimbangan yang matang. Pembukaan akses hingga merata ke seluruh santri perlu terus-menerus diupayakan. Hal itu bisa disosialisasikan sesuai dengan material yang ada dalam pesantren terutama penyesuaian pemahaman terhadap kitab fiqh. Sosialisasi bisa dilakukan dengan pemberian material baru dengan memasukkan perhatian terhadap berbagai aspek yang ada dalam pesantren sehingga kebaruan itu tidak menimbulkan gejolak yang berpengaruh terhadap proses kehidupannya, terutama dalam internalisasi fiqh, quran dan hadis. Di aspek pemerataan pendidikan dan intervensi bagi kesejahteraan itulah pemerintah mendapat peluang untuk mengurangi praktek pernikahan sirri di masyarakat muslim.

Aspek kebutuhan pengetahuan yang merata dan meluas juga menjadi perhatian Siti Aisyah dalam tulisannya tentang pendidikan calon pengantin. Di sini, ia juga menyarankan pemerintah bersama masyarakat dan organisasinya untuk terlibat aktif demi pemahaman yang utuh tentang perkawinan menuju keluarga sakinah. Pendidikan itu bisa mengurangi dampak buruk kependudukan dewasa ini dengan penuh kesadaran dan niat yang mulia dari pribadi-pribadi yang telah mengikutinya.

Telaah Al Amin dan Dhifla Najih tentang buku ‘Diskursus Politik Islam’ di akhir jurnal ini seakan menjadi rangkuman semua ragam kajian relasi Islam negara sebelumnya. Meski buku ini disimpulkan hanya

membahas dalam satu perspektif, namun keduanya telah melengkapinya dengan penjelasan tentang tipe relasi Islam dan Negara yang lain. Pengayaan itu bisa memberikan wawasan yang menyeluruh bagi pembaca.

Sebelum telaah pustaka di akhir sesi jurnal ini, Muthmainnah menyempatkan diri untuk memberikan kritikan terhadap karya salah satu ulama falak termasyhur di Indonesia. Guru Manshur Jembatan Lima adalah penulis kitab Sullam al Nayyiroin. Buku sederhana itu bermanfaat untuk menentukan awal bulan Qamariah dan gerhana. Kesederhanaannya bisa dilihat dari penggunaan tabel astronomis Ulugh Beg as-Samarkandi, serta perhitungannya tidak berbasis segitiga bola, melainkan dengan cara biasa dan manual.

Akhirnya, kajian dalam penerbitan volume ini diharapkan manfaatnya bagi perkembangan kajian ilmu-ilmu keislaman bidang Hukum Islam. Penegakannya diperlukan dalam penguatan orientasi kebutuhan pemeluk Islam dengan tetap berpijak pada dimensi tauhidnya. Amin.

Billahi fi sabilil haqq

Wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Hormat Kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

No.	Judul dan Penulis	Hal.
1.	URGENSI JARINGAN DALAM TATA NEGARA ISLAM Rizal Al Hamid	1-11
2.	NASIONALISME DALAM TINJAUAN ISLAM Ahmad Hanany Naseh	12-23
3.	JAMINAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM Andrie Irawan	24-32
4.	PERNIKAHAN SIRRI DI KALANGAN SANTRI STUDI KASUS PONDOK PESANTREN NIDAUL UMMAH GILANG HARJO PANDAK BANTUL Agus Tri Wijaya, F. Setiawan Santoso, Nurjiddin	33-44
5.	PENDIDIKAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN MENUJU KELUARGA SAKINAH Siti 'Aisyah	45-56
6.	SISTEM HISAB MENURUT HISAB SULLAM AN-NAYYIRAIN DALAM PERSPEKTIF FIKIH Muthmainnah	57-69
7.	TINJAUAN PUSTAKA DISKURSUS POLITIK ISLAM M. Nur Kholis Al Amin, Dhifla Najih	70-77

NASIONALISME DALAM TINJAUAN ISLAM

Ahmad Hanany Naseh

Dosen FTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
hananyaseh@gmail.com

Abstract

In the global history of Islam as well as in its local context of Indonesia, the essence of nationalism is the willingness to unite as one nation in the political sense. This unity of the nation in the political sense will become much stronger when supported by factor of one religion, one language, and one race which is more prominent. But the fanatical nationalism without tolerance to underestimate religious values are certainly not in line with the values of Islam. Nationalism in the Islamic view is love and loyalty to the homeland that should not exceed the love and loyalty to Allah and His Messenger.

Keywords: Nasionalism, history, politics, Islam

A. Pendahuluan

Banyak sekali konsep-konsep modern dalam berbagai aspek kehidupan muncul dan berkembang di dunia Barat dalam beberapa abad terakhir ini. Konsep-konsep itu bersama ilmu dan teknologi modern mendapat perhatian yang besar bagi siapapun yang ingin memajukan masyarakatnya setaraf dengan masyarakat dan dunia Barat.

Di antara konsep-konsep modern yang muncul di Barat itu adalah nasionalisme. Bervariasi pengertian yang diberikan orang dan berbeda-beda pula penilaian terhadapnya. Banyak orang melihat nasionalisme sebagai kekuatan pemecah belah dunia; sebagian orang menganggapnya sebagai perangsang bangsa-bangsa”.¹

Dengan judul di atas, penulis mempunyai tujuan pokok yaitu meninjau nasionalisme dari sudut Islam. Dapatkah semua pengertian-pengertian yang dihubungkan orang dengan nasionalisme itu diterima oleh Islam? Bagaimanakah corak nasionalisme yang sesuai dengan Islam? Sebelum tinjauan itu dilakukan, lebih dahulu penulis mengemukakan pengertian, pertumbuhan Nasionalisme, dan Pergerakan Nasional di Indonesia.

B. Pengertian Dan Pertumbuhan Nasionalisme

Term nasionalisme¹ berasal dari bahasa Inggris “Nationalism”, paduan dari “nasional” dan “ism”. Nasional adalah kata sifat yang berarti “of a nation or the nation” (berkenaan dengan bangsa) dan nation itu adalah kata Inggris

yang berasal dari bahasa Latin “ natio, natus” yang berarti “to be born” (dilahirkan).² Nation, artinya menurut bahasa menjadi masyarakat atau bangsa.

Dewasa ini nation (bangsa) mengandung dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti kebudayaan dan bangsa dalam arti politik. Bangsa dalam arti kebudayaan adalah suatu Cultural Unity, merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri, dimana masing-masing anggota merasa satu kesatuan dalam ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat yang sama. Bangsa dalam pengertian politik (kenegaraan) adalah suatu political unity, suatu kesatuan dimana masing-masing anggota mungkin saja berbeda kebudayaan, adat istiadat atau kebiasaannya.

Di dalam satu *political unity* terdapat banyak elemen dari beberapa cultural unity, dan bisa pula terdiri dari satu cultural unity saja.³ Nasionalisme secara harfiah berarti paham tentang bangsa atau paham kebangsaan, dan bangsa yang dimaksud disini menurut Huszar dan Stevenson adalah “*the natural and desirable political unit*”,⁴ kesatuan politik yang wajar dan diinginkan. L. Stoddard memberi definisi sebagai berikut : “*nationalism is belief, held by a fairly large number of individuals, that they constitute a nationality*”, (nasionalisme adalah satu keyakinan yang dimiliki bersama oleh sejumlah besar individu, bahwa mereka merupakan satu kebangsaan, nationality). Pengertian bangsa ini digambarkan dalam pikiran penganutnya sebagai rakyat atau masyarakat yang bergabung bersama dan tersusun dalam satu pemerintahan dan berdiam bersama dalam suatu daerah tertentu. Bila cita-cita nasional telah menjadi kenyataan, maka terbentuklah suatu badan politik yang dikenal sebagai Negara.⁵

Untuk memahami lebih lanjut konsep Nasionalisme itu, baik dilihat pertumbuhan atau perkembangannya. John B. Whitton menulis sebagai berikut ;²

“ *It is impossible to fix a date for the beginning of modern nationalismsome authorities place the actual origins of modern nationalism at the time of the reformations; others date it from the place of westphalia in 1648, which ushered in the modern system of independent sovereign states. Still other authorities, and they represent the majority, insist that that nationalism as we know it began with the French Revolution*”.⁶

Selanjutnya dikatakan oleh Whitton bahwa “The great apostle of modern nationalism was Jean Jacques Rousseau”.⁷ Rousseau ini (1712-1778) menekankan nilai kesatuan moral dari rakyat yang terpaut bersama untuk

mencapai tujuan bersama. Ia menegaskan bahwa masyarakat (community) haruslah diperintah dengan undang-undang yang terbit dari mereka sendiri, bukan dari raja yang mempunyai sifat ketuhanan dan berdiri di atas undang-undang. Ia menekankan perlunya satu kesetiaan tertinggi (a supreme loyalty) kepada tanah air, satu kewajiban yang demikian sucinya sehingga hampir menjadi satu sendi dari kepercayaan agama. Ia mencela suatu ide kepercayaan kepada sesuatu yang lebih tinggi, seperti masyarakat dunia atau keseluruhan ras manusia. Ringkasnya ia berusaha membangkitkan massa rakyat kepada satu keyakinan kepada satu warisan bersama, nasib yang sama, dan menuntut bagi orang-orang satu status masyarakat yang demokratis dan bagi bangsa-bangsa satu hak untuk menentukan nasib sendiri (*right of self determination*), menurut Witton, "It was for the men of 1789 to put these principles into practice, at least for a time"⁸

Hans Y Margaretha menyatakan bahwa sebelum perang Napoleon, sedikit sekali penduduk suatu negara mendukung politik luar negeri negaranya, karena politik luar negerinya tidak bersifat nasional dalam arti sesungguhnya, tapi adalah politik dinasti, untuk kewibawaan raja, bukan kewibawaan bersama sebagai suatu bangsa.⁹ Dengan keterangan ini jelaslah mengapa Rousseau menekankan perlunya undang-undang yang dibuat oleh rakyat sendiri dan status persamaan yang demokratis bagi individu-individu, yaitu supaya dapat diwujudkan "a supreme loyalty" kepada tanah air demi kewibawaan sebagai bangsa.

C.J.H. Hayes menyatakan bahwa revolusi Perancis menciptakan satu negara nasional yang sesungguhnya, dimana perbedaan khas dan lokal dihapuskan, gereja disekulerkan dan semua lembaga baik lembaga politik maupun gereja diletakkan di atas satu basis nasional dan dibuat mengabdikan untuk tujuan-tujuan nasional. Selanjutnya ia menyatakan "The France Revolution inculcated the doctrine that all citizens owed their first and paramount loyalty to the national state".¹⁰

Revolusi yang meletus pada tahun 1789, telah diikuti oleh serangkaian peperangan antara Perancis dan negara-negara lain di Eropa. Peperangan ini telah membangkitkan dengan hebat patriotisme di kalangan rakyat-rakyat lain di Eropa dan juga di Amerika. Berkembangnya "mass education" dan tercapainya alat-alat komunikasi dan transportasi modern merupakan faktor penting yang menyebabkan ide Nasionalisme tersebar luas secara cepat, sehingga "the 19th century has been called by some authors the great age of nationalism".¹¹

Ide "National Self-Determination" seperti yang dikemukakan Rousseau sangat mendorong bangsa-bangsa untuk memiliki suatu negara yang

merdeka, berdaulat keluar dan kedalam. Yunani dan Belgia memperoleh status kebangsaannya pada pertengahan pertama abad 19, Jerman dan Itali memperoleh kesatuannya masing-masing pada pertengahan kedua abad itu. Demikian juga Serbia, Rumania, dan Montenegro memperoleh kemerdekaannya.¹²

Menurut analisa Ruslan Abdul Gani;

Nasionalisme Eropa Barat membangunkan kesadaran akan adanya perbedaan antara bangsa Inggris, Jerman, bangsa Prancis, bangsa Spanyol, Portugis, dan sebagainya lagi. Kesadaran ini melahirkan pula keharusan akan adanya perbatasan yang tajam antara negara-negara mereka masing-masing. Dengan mendapat api semangat persaingan bebas dari paham liberalisme dan dibesarkan dalam masyarakat yang bercorak industriil-kapitalisme, sehingga emosi dan sentimen, penuh dengan kecongkakan dan chauvinisme, sehingga Nasionalisme Eropa Barat pada waktu itu melahirkan kolonialisme, yaitu nafsu untuk mencari jajahan di luar benuanya sendiri. Di bumi kelahirannya sendiri, maka nasionalisme Eropa Barat tumbuh menjadi fasisme, waktu militerisme dapat menguasai nafsu nasionalisme yang chauvinistis itu. Dan di waktu nasionalisme itu dikuasai oleh kapitalisme maka hal ini mendorong timbulnya imperialisme. Semasa kapitalisme mencapai tingkatan yang setinggi-tingginya dan perindustrian maju pesat dan proletar bertambah besar jumlahnya, maka lahirlah ajaran komunisme.¹³

Nasionalisme di Barat dalam masa antar 1815-1880, oleh beberapa penulis disebut Liberal Nationalism.¹⁴ Kemunculan fasisme pada pertengahan pertama abad ini, maka periode ini dapat disebut pula “ the period of internal or facist nationalism ”.¹⁵ Ide Nasionalisme, sebagaimana halnya juga ide-ide modern lainnya masuk ke Dunia Islam bersama dengan masuknya penjajah Barat. Disamping itu juga melalui pelajar/mahasiswa dari Dunia Islam yang belajar di Eropa. Dua tenaga besar, yaitu semangat Islam yang dinamis dan semangat nasionalisme telah mendorong pemimpin bersama rakyatnya untuk menentang dan melawan penjajah Barat. Said Jamaluddin Al-Afqani, sebagaimana telah diketahui, merupakan tokoh pejuang Islam yang mengembara menjelajahi negeri-negeri Islam dan berusaha menggabungkan semangat perjuangan untuk menentang dan mengusir penjajah Barat. Ide yang diperjuangkannya bukanlah Nasionalisme, tapi persatuan Islam yang kokoh dan kuat (Pan Islam) untuk menghadapi penjajah Barat.

Banyak bermunculan tokoh-tokoh ulama, baik mereka pembaharu atau tradisionalis berjuang menyadarkan rakyat dalam rangka membebaskan diri dari penjajah Barat. Umumnya mereka mendasarkan perjuangan itu pada

semangat Islam yang pantang dihina atau dijajah orang kafir. Disamping itu bermunculan tokoh-tokoh dari golongan terpelajar yang mengecap pendidikan Barat baik di dalam maupun di Eropa. Mereka itu umumnya mendasarkan perjuangan pada konsep Nasionalisme. Muncullah Mustafa Kamil, Saad Zaqlul, Toha Husen, dll. di Mesir ; Zia Gokalp, Mustafa Kamal dll. di Turki ; Abdul Kalam Azad di India ; Soekarno Hatta dll. di Indonesia. Mereka adalah orang-orang Islam, tapi tidak mau mendasarkan perjuangannya pada Islam. Kelompok itu lebih tertarik dengan ide-ide Barat dari pada dengan Islam.

Dengan ringkas dapat dinyatakan bahwa dengan semangat Islam dan Nasionalisme itu satu demi satu wilayah dalam Dunia Islam bebas kembali dari penjajahan Barat. Dan dibawah pengaruh konsep Nasionalisme pada umumnya , dunia Islam muncul dengan kesatuan-kesatuan yang banyak, yaitu : Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Sudan, Mesir, Turki, Libanon, Syiria, Irak, Arab Saudi, Yaman, Oman, Abu Dhabi, Kuwait, Iran, Afghanistan, Pakistan/Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dll.

C. Pergerakan Nasional Indonesia

Meskipun harus diteliti kembali, tanggal 20 Mei 1908 selama ini diakui sebagai hari Kebangkitan Nasional. Hari itu adalah hari kelahiran organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Sutomo atas dorongan Wahidin Sudirohusodo.¹⁶Pergerakan Nasional mengandung arti pergerakan dalam bentuk organisasi yang teratur untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu kemerdekaan nusa dan bangsa.¹⁷ Budi Utomo yang dipandang sebagai awal dari Pergerakan Nasional Indonesia, sebenarnya belum mencetuskan tujuan untuk “kemajuan yang harmonis untuk nusa adan bangsa Jawa dan Madura ”.¹⁸ Organisasi ini tidak pernah mendapat dukungan massa dan karena itu kedudukannya secara politik tidak begitu penting.¹⁹

Pada tahun 1909, Serikat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh Tirtohadisuryo di Bogor, disusul pada tahun 1911, dengan SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo. SDI ini bertukar nama menjadi serikat islam (SI) pada 10 September 1912, pada waktu mana juga telah ditetapkan tujuannya, yaitu : memajukan perdagangan, memberi pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesukaran, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli dan memajukan kehidupan Agama Islam.²⁰ Jika tadi Budi Utomo mau memajukan atau membangkitkan kesadaran bangsa (penduduk Asli) Jawa Madura, maka Serikat Islam inilah yang pertama mau membangkitkan seluruh penduduk Asli yang sedang dijajah Belanda. Serikat Islam memang berhasil mendapat dukungan massa yang banyak, sehingga pada tanggal 17-24 Juni 1961, SI dapat menyelenggarakan Kongresnya yang

bersifat nasional di Bandung, yaitu National Indische Congress, yang dihadiri 80 lokal SI (mewakili 360.000 anggota dari segenap penjuru tanah air)²¹ dan inilah arena pertama dimana perasaan kebangsaan yang mengikat seluruh suku bangsa di tanah Hindia-Belanda menampakkan dirinya secara nyata. Menurut Susanto Tirtoprodjo, “istilah nasional” dipergunakan untuk menegaskan bahwa SI mencita-citakan supaya penduduk Asli Indonesia menjadi satu natis, satu bangsa”²²

Pada kongresnya yang kedua (20 – 27 Oktober 1917), ditegaskan lagi tujuan akhir SI, yaitu mendapatkan *Zelf-bestuur* (pemerintahan sendiri) dan perjuangan menentang penjajahan daripada kapitalisme yang jahat.²³ Pada kongresnya lagi bulan Januari 1927 “SI menegaskan bahwa tujuan partai SI ialah mencapai kemerdekaan nasional atas dasar agama Islam”.²⁴ Pemimpin SI yang terkenal ialah HOS Cokroaminoto dan H. Agus Salim, dan karena SI mempunyai massa yang besar, maka tentu perjuangan SI ini sangat besar artinya dalam bidang politik. 4

Organisasi yang lain yang lahir berdekatan dengan kelahiran SI adalah Indische Partij (IP). IP lahir pada tanggal 25 Desember 1912, tetapi tidak mendapat pengakuan dari Belanda, sehingga statusnya adalah terlarang. IP yang didirikan oleh Douwes Dekker itu menggariskan tujuannya sebagai berikut: Tujuan Indische Partij ialah untuk membagunkan patriotisme semua Indiers terhadap tanah air, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air ‘Hindia’ dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.²⁵

Menurut Hatta, Indische Partij adalah yang mula-mula mencetuskan cita-cita tanah air dan bangsa.²⁶ Meskipun demikian, karena statusnya yang terlarang dan karena ketiga pemimpinnya (Douwis Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suryadi Suryadiningrat) pada bulan Agustus 1913 dijatuhi hukuman buang (mereka memilih ke negeri Belanda), maka partai itu tidak bisa berbuat apa-apa.

Perkumpulan pelajar “Indische Vereeniging” yang didirikan di negeri Belanda sejak tahun 1908, yang merubah namanya menjadi “Indonesische Vereeniging” pada tahun 1922. Pada tahun 1925 di samping nama dalam bahasa Belanda itu, dipakai juga nama dalam bahasa Indonesia (Melayu) yaitu Perhimpunan Indonesia (PI), dan lama-lama kemudian hanya nama PI saja yang⁵ dipakai.²⁷ Majalahnya yang bernama Hindia Poetra telah berubah nama menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924. Memang sejak tahun itu Perhimpunan Indonesia menyatakan dengan tegas tujuannya, yaitu

Kemerdekaan Indonesia, sejak itu pula kata “Indonesia” sebagai nama politik diterima oleh seluruh pergerakan nasional”.²⁸

Indische Sociaal Demakratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan pada tahun 1913 oleh Sneevlit, Semaun, dan lain-lain, pada tahun 1920 berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia. Partai itu berusaha mengacau SI dan merebut massanya, serta seringa melakukan agitasi yang berujung dengan meletusnya pemberontakan pada tahun 1926/1927. Akibat pemberontakan yang dalam waktu singkat dapat dipadamkan Belanda, partai itu dilarang hidup dan pada tahun-tahun berikutnya Pergerakan Nasional Indonesia mengalami penindasan yang luar biasa sehingga sama sekali tidak dapat bergerak.²⁹

Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) berdiri pada 4 Juli 1927 atas inisiatif Soekarno dan Kawan-kawan di Bandung.. Dengan tegas partai ini menyatakan tujuannya untuk mencapai Indonesia merdeka. Sebagaiu dasarnya adalah *Selfhelp*, non-Koperasi, dan Marhaenisme. Pada tahun 1928 PNI menggariskan sejumlah program, di antaranya: memperkuat perasaan kebangsaan dan persatuan Indonesia, berusaha mencapai perekonomian nasional dan memajukan pengajaran nasional.³⁰

Berkat keoratoran Soekarno, PNI meluas dengan cepat sehingga mengkhawatirkan Belanda. PNI dicurigai, diancam dan akhirnya karena ada desas desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930, maka pada tangga 29 Desember 1929, Soekarno dan beberapa kawannya ditangkap. Penangkapan terjadi di berbagai kota, sehingga lebih 400 orang yang ditangkap.³¹ Dengan alasan keadaan memaksa, PNI mengadakan kongres luar biasa pada 25 April 1931 untuk membubarkan diri, pembubaran yang disambut dengansikap pro dan kontra oleh para pendiukungnya.

Disamping organisasi-organisasi yang telah disebutkan di atas masih banyak lagi organisasi yang lain, ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat sosial, agama, pendidikan, dan lain-lain. Yang bersifat/berasas Islam misalnya Jami’at Khair (lahir 1901), Muhammadiyah (1912, organisasi yang besar dengan cabang dan sekolahnya yang banyak di seluruh tanah air), al-Irsyad (1914), PERSIS (1923), NU (1926) meskipun tidak menjuruskan dirinya pada politik namun peranan ulama-ulamanya atau pemimpinnya sangat besar untuk meningkatkan kesadaran rakyatnya, bukan saja terhadap agamanya, tetapi juga terhadap hak-hak dan kewajibannya untuk kemerdekaan tanah air.

Demikianlah usaha-usaha yang telah dirintis sejak semula telah membuahkan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Isinya

menyatakan: Berbangsa satu, Bangsa Indonesia; Berbahasa satu, Bahasa Indonesia; Bertanah air satu, Tanah air Indonesia; satu tekad yang kompak yang akhirnya setelah melalui pahit getirnya perjuangan menjelmakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas jelaslah bahwa Budi Utomo adalah pencetus pertama kebangsaan Jawa/Madura (1908); Indische Partij pencetus pertama ide Nasionalisme Hindia (Persatuan penduduk asli, indo dan peranakan asing lainnya sebagai satu bangsa (1913); Serikat Islam sebagai pelaksana pertama dalam bentuk kongresnya persatuan penduduk asli Hindia Belanda (1916), kemudian menuntut "Zelf Bestuur" (1917); Perhimpunan Pelajar Indonesia di Negeri Belanda yang pertama menggunakan istilah "Indonesia" dalam arti politik (1922). Pada tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut PI (1924), SI (1927), PNI (Juli 1927) menyatakan dengan tegas bahwa tujuan pergerakannya adalah Indonesia Merdeka. Proses pertumbuhan ide Nasional Indonesia yang memperoleh bentuknya yang paling meyakinkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

D. Hakekat Dan Corak Nasionalisme Ditinjau Dari Sudut Islam

Hakekat yang terdapat dalam Nasionalisme, tidak lain dari kemauan untuk bersatu sebagai satu bangsa dalam arti politik. Semakin besar jumlah individunya yang mau bersatu, semakin kuatlah persatuan bangsa itu. Dengan ungkapan lain hakekatnya tidak lain dari keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu ; keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.³² Kemauan untuk bersatu itu bisa mengendor dan bisa semakin kuat, tergantung kepada berkurang atau bertambah kuatnya, perasaan senasib dan setujuan itu.

Kemauan untuk bersatu itu mungkin saja mula-mula dimiliki oleh sejumlah kecil individu, tetapi lambat laun, melalui propaganda, pendidikan, dan lain-lain kemauan itu menjadi milik orang banyak. Faktor kesatuan bahasa, satu agama, dan satu ras, dapat menjadi basis yang memperkuat nasionalisme, tetapi bukanlah faktor yang mutlak harus ada. Kesatuan politik yang didukung oleh faktor di atas niscaya kuat sekali persatuannya, tapi dalam kenyataan dewasa ini mungkin tidak ada lagi suatu negara nasional dengan satu agama, satu bahasa, dan satu ras.

Dilihat dari sudut Islam, kemauan untuk bersatu dalam kesatuan negara itu tifoldak ada salahnya. Islam mengakui bahwa Tuhan memang menjadikan manusia itu berkelompok-kelompok; berkabilah, dan berbangsa-bangsa. Tidak ada salahnya muncul unit-unit manusia (masyarakat) dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya: unit satu keluarga, satu desa, seprovinsi, senegara, sebenua, dan seterusnya. Syaratnya selagi tidak untuk bermusuhan-musuhan atau menghalangi untuk saling berkenalan, berbuat baik atau berbuat yang ma'rif. Dasar pendirian ini dapat ditemukan dalam kitab al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13

Yang banyak mendapat sorotan negatif dari Islam adalah corak-corak Nasionalisme yang telah banyak diperlihatkan oleh sejarah dunia. Ada corak Nasionalisme yang fanatik yang menggemakan slogan-slogan seperti "God's chosen people" my country right or wrong" atau " My Country always right"³³ Nasionalisme yang fanatik ini jelas bertentangan dengan Islam. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa tidak ada kelebihan Arab dari bukan Arab, demikian pula sebaliknya, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih dari yang berkulit hitam, demikian pula sebaliknya.

Sikap nasionalisme yang fanatik itu tidak lain dari *ashobiyah* yang dicela Islam. Nabi Muhammad Saw pernah bersabda bahwa tidaklah termasuk golongan kita orang yang mengajak kepada kepada *ashobiyah*, orang yang berperang dengan dasar *ashobiyah* dan yang mati karena *ashobiyah*. Corak nasionalisme yang tidak toleran dapat pula mengambil bentuk perasaan benci terhadap bangsa lain, seperti dahulu nasionalisme Amerika yang membenci (anti) terhadap Inggris, Nasionalisme Inggris yang anti Prancis, Nasionalisme Prancis yang membenci/anti Jerman, dan Nasionalisme Polandia yang tidak menyukai Rusia dan Jerman.³⁴ Corak nasionalisme yang tidak menghapus kebencian kepada bangsa lain adalah bertentangan dengan Islam. Islam menginginkan kedamaian, persaudaraan di atas landasan kebenaran dan keadilan.

Ada lagi corak nasionalisme yang merugikan perkembangan Islam dan kehidupan kaum muslimin. Ini tentu ditentang oleh Islam. Corak nasionalisme yang dikehendaki Mustafa Kamal di Turki yang menghapus mahkamah syari'at, menutup madrasah al-Qur'an, dan tidak ambil pusing dengan urusan Islam, padahal masih mengaku beragama Islam atau sebagai muslim, adalah Nasionalisme sekular yang ditentang oleh Islam.

Demikian pula Nasionalisme India (*Congress*) tidak disokong oleh pemimpin Islam umumnya tidak lain karena dirasakan sekali bahwa hak-hak politik umat Islam sebagai minoritas sangat diabaikan. Bila kepentingan

Islam tidak diremehkan oleh Nasionalisme India maka tentulah para pemimpin Islam akan mendukungnya.

Di Indonesia pada masa pergerakan nasional (tahun dua puluhan dan tiga puluhan) terjadi perdebatan/polemik antara nasionalis yang berjiwa Islam kuat dengan nasionalis yang anti Islam, atau dangkal jiwa Islamnya. Yang kedua (belakangan) ini mempropagandakan seolah-olah Islam menghalangi atau menentang nasionalisme. Hal ini dijawab oleh Cokroaminoto (pada tahun 1925) sebagai berikut:

“Islam does not in the least hamper or obstruct the creation and the course of real nationalism, on the other hand Islam promotes it. (But) the nationalism which is championed by Islam is not narrow nationalism and is not dangerous (to other) and Leads to Islamic socialism, i.e. socialism which creates monohumanism (the unity of mankind) controlled by the supreme being, Allah . . . through the laws which had been revealed to his Apostle, the last of the Prophets, Muhammad . . . “³⁵

Haji Agus Salim mengemukakan corak Nasionalisme yang dipropagandakan Soekarno dan kawan-kawan, karena dalam penilaian Haji Agus Salim, Nasionalisme telah diangkat menjadi agama. Ia menyatakan sebagai berikut: “Our love for the people causes us to honour and respect our fellow countrymen, but it will not elevate kebangsaan to an idol to be worshipped and adored”.³⁶ Muhammad Natsir juga mengemukakan Soekarno dan kawan-kawan, karena corak nasionalismenya itu mengecilkan arti agama Islam. Natsir menyatakan sebagai berikut:

The aim of the muslims in fighting independence is for the freedom of Islam order that Islamic rules and regulations be realized for the well being and perfection of the muslims as well as of all Allah’s creatures. Is this also their aim and ideal? They, who from now on have already adopted a ‘neutral’ attitude toward religion, who at present have already minimized the significance of Islam, do not want to be involved in all matters tinted with Islam”.³⁷

Dari apa yang dikemukakan oleh Cokroaminoto, Agus Salim, dan Natsir di atas, semakin jelaslah bahwa nasionalisme yang tidak dibenarkan oleh Islam itu adalah nasionalisme yang memuja-muja tanah air seperti memuja Tuhan, dan cenderung untuk mengabaikan nilai-nilai Islam. Nasionalisme yang cocok dengan Islam adalah nasionalisme yang memupuk persahabatan dan kerjasama yang adil antar bangsa, nasionalisme yang saling membantu untuk kebaikan, bukan untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tegasnya nasionalisme yang paling cocok dengan Islam adalah corak nasionalisme yang tidak meletakkan loyalitas kepada tanah air di atas segala-

galanya, tetapi meletakkan loyalitasnya kepada Allah dan RasulNya di atas dari segalanya.

E. Kesimpulan

Hakikat nasionalisme adalah kemauan untuk bersatu sebagai satu bangsa dalam arti politik, dimana kesatuan bangsa dalam arti politik itu menjadi jauh lebih kokoh bila didukung oleh faktor, satu agama, satu bahasa, dan satu ras. Namun faktor tersebut tidaklah harus ada. Persatuan itu akan sangat kuat bila perasaan senasib dan satu tujuan betul-betul real. Pada umumnya orang memandang bahwa nasionalisme modern mulai muncul pada waktu revolusi Prancis, karena abad 19 dipandang sebagai abad Nasionalisme, yang mana pengaruhnya meluas dari Eropa ke berbagai negara termasuk dunia Islam/Indonesia. Nasionalisme yang fanatik, tidak toleran, atau meremehkan nilai-nilai agama tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nasionalisme dalam pandangan Islam adalah dimana cinta dan loyalitas kepada tanah air tidak boleh melebihi cinta dan loyalitasnya kepada Allah dan RasulNya.

Catatan Akhir

¹A.G. Pringgodigdo dan Hasan Shadily, *Encyclopedia Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1973), h. 874.

² *Websters's New Word Dictionary of The American Language (pada kata: nation dan national)*.

³ Aminuddin Nur, *Pengantar Studi Sedjarah Pergerakan Nasional*, (Djakarta: PT Pembangunan Mas, 1967), h. 87 - 90.

⁴ *Ibid.*, h. 92.

⁵ *Ibid.*, dan L. Stoddard *Dunia Baru Islam (Terjemahan dalam bahasa Indonesia)*, h. 137-138.

⁶ John B. Witton, "Nationalism dan Internationalism", dalam *Teh Encyclopedia Americana*, Vol. 8, New York, 1956, h. 752-753.

⁷ *Ibid.*, h. 753.

¹³ Aminuddin, *Pengantar ...*, h. 107-108.

¹⁴ C.J.H. Hayes, "Nationalism" dalam *ERA Soligman, Encyclopedia of The social sciences*, Vol.11. (New York: The Macmillan Company, 1963), h. 244.

¹⁵ J.B. Whitton, *Nationalism and Internationalism, The Encyclopedia Americana*. (New York: The America Corporation, 1956), h. 753

¹⁹ Jusmar, Basri, (ed.), *Sejarah nasional Indonesia*, v., (Jakarta: Dept. P & K, Balai Pustaka, 1977), hal. 187.

²⁰ Susanto Tirtiprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1970), hal. 26-27.

²¹ Lihat Bab Tambahan dalam L. Stoddard, Op. Cit., hal. 328.

²² Susanto Tirtiprodjo, *Sejarah...*, h. 29.

²³ *Ibid.*, h. 30.

²⁴ *Ibid.*, h. 38.

²⁵ Jusmar, Basri (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia*, V. (Jakarta: Dept. P dan K., Balai Pustaka), 1977, h. 191.

²⁶ Hatta, *Kumpulan Karangan*, (Djakarta, Penerbit dan Balai Buku Indonesia, 1953). h. 34.

²⁷ Jusmar, Basri (ed.), *Sejarah...*, H. 199-200.

²⁸ Hatta, *Kumpulan ...*, h. 37.

²⁹ Jusmar, Basri (ed.) *Sejarah...*, 220-221.

³⁰ Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah...*, h. 60-61.

Daftar Pustaka

- Anshori, Saifuddin. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam*. Bandung: Penerbit: C.V. Pelajar, 1969.
- Basri, Jusmar, Drs., (ed.). *Sejarah Nasional Indonesia, V*. Jakarta: Dept. P dan K., Balai Pustaka, 1977.
- Hanifah, Abu, Dr. *Soal Agama dalam Negara Modern*. Djakarta: Tintamas, 1949.
- Hassan A. *Islam dan Kebangsaan. Cet. Ke 5*. Penerbit Persatuan Bangil, 1972.
- Hatta, Mohammad. *Kumpulan Karangan*. Djakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia, 1953.
- Hayes, Carlton J.H. "Nationalism" dalam *ERA Soligman, Encyclopedia of The social sciences, Vol.11*. New York: The Macmillan Company, 1963.
- Ismaun, Drs. *Problematik Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*. Bandung: Penerbit Carya Remaja, 1976.
- Jameelah, Maryaam. *Islam and Modernism*. M. Jusuf Khan, Lahore, 1966.
- Khahin G. Mc Turnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca New York: Cornell University Press, 1952.
- Mc Neil, William H., dan M.R. Waldman. *The Islamic Word*. London: Oxford University Press, 1973.
- Nasution, Harun. Dr. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Noor, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. London-New York: Oxford University Press, 1973.
- Nur, Aminuddin. Drs. *Pengantar Studi Sedjarah Pergerakan Nasional*. PT. Pembimbing Masa, 1967.
- Ramadan, Said. Dr. *Islam dan Nasionalisme (Terjemahan Indonesia)*. Djakarta: Bulan Bintang, Djakarta, 1969.
- Stoddar, L. *Dunia Baru Islam*. Terjemahan Panitia Penerbit (Mulyadi Djojomartono, dkk.), Jakarta.
- Tirtoprodjo, Susanto, Drs. S.H. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Cet. 5*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1970.
- Whitton, John B. *Nationalism and Internationalism, The Encyclopedia Americana*. New York: The America Corporation, 1956.